

**TANTANGAN KUALITAS PRAKTIK DEMOKRASI PROSEDURAL  
DI NEGARA BERKEMBANG:  
PARTISIPASI POLITIK DAN PERILAKU PEMILIH**

**Yulita Nilam Fridiyanti**

*Prodi Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim*

[yulitanilam95@gmail.com](mailto:yulitanilam95@gmail.com)

**Abstrak**

*Penelitian ini berupaya untuk menemukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pemilu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku masyarakat dalam pemilu di Indonesia. Guna menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dalam pengambilan data penelitian. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Selain itu, perilaku pemilih dalam menghadapi pemilu dipengaruhi oleh beberapa hal yang terkait dengan faktor sosiologis, faktor psikologis, dan juga faktor rasional/ekonomi. Faktor-faktor perilaku pemilih tersebut berpengaruh besar terhadap keterlibatan masyarakat khususnya pada penggunaan hak pilih suara saat pemilu.*

**Kata Kunci:** *Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, Pemilu, Demokrasi*

**A. Pendahuluan**

Demokrasi adalah prasyarat mutlak untuk menghadirkan kesejahteraan dan kemandirian dalam suatu bangsa, dan merupakan tema sentral dalam perubahan ekonomi-politik dunia dewasa ini, yang didalamnya tercakup berbagai persoalan yang saling berkait satu sama lain baik disebabkan dari sisi institusional maupun perilaku masyarakat. Dalam literatur politik (modern) disebutkan beberapa ciri pokok dari sebuah sistem politik yang demokratis, adalah: *Pertama*, adanya partisipasi politik yang luas dan otonom; demokrasi pertama-tama mensyaratkan dan membutuhkan adanya keleluasaan bagi siapa pun-baik individu maupun kelompok-secara otonom. Tanpa perluasan partisipasi politik yang otonom, demokrasi akan berhenti sebagai jargon politik semata. Oleh karena itu, elemen pertama dalam sebuah system politik yang demokratis ialah adanya partisipasi politik yang luas dan otonom. *Kedua*, terwujudnya kompetisi politik yang sehat dan adil. Dalam konteks demokrasi liberal, seluruh kekuatan politik (partai politik) atau kekuatan social

kemasyarakatan (kelompok kepentingan dan kelompok penekan) diakui hak hidupnya dan diberi kebebasan untuk berkompetisi secara adil sebagai corong masyarakat, baik dalam pemilihan umum atau dalam kompetisi sosial-politik lainnya. *Ketiga*, adanya suksesi atau sirkulasi kekuasaan yang berkala, terkelola, serta terjaga dengan bersih dan transparan-khususnya melalui proses pemilihan umum. *Keempat*, adanya monitoring, kontrol, serta pengawasan terhadap kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, dan militer) secara efektif, juga terwujudnya mekanisme checks and balances di antara lembaga-lembaga Negara. Serta *kelima*, adanya tatakrama, nilai, norma yang disepakati (bersama) dalam bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Partisipasi politik masyarakat adalah suatu bentuk aktualisasi proses demokrasi. Partisipasi politik pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara, dalam menginterpretasikan sejumlah symbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus dengan langkah-langkahnya) kedalam symbol-simbol pribadi. Kegiatan partisipasi politik pada intinya tertuju pada dua subjek, yaitu pemilihan pemimpin dan melaksanakan kebijakan pemimpin (Ngongolay, 2015). Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik (Sastroatmodjo, 1995).

Dalam pelaksanaan pemilihan umum nilai demokrasi merupakan landasan utama dalam penyelenggaraannya. Hal tersebut dikarenakan bahwa nilai yang orisinal dimiliki bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah nilai demokrasi. Salah satu wajah dari demokrasi elektoral yang dilaksanakan di negara-negara berkembang adalah adanya agenda-agenda politik dan kinerja legislatif atau pemimpin hasil Pemilu yang tidak berbanding lurus dengan kepentingan rakyat pada umumnya. Hal ini menyebabkan minimnya representasi elektoral atau menurunnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilu, sehingga yang terjadi adalah para pemimpin yang maju dalam pemilu harus menggunakan berbagai cara agar masyarakat dapat turut andil dalam proses elektoral yang ada meskipun dengan cara politik uang, propaganda, penyebaran hoax, dan yang lain sebagainya.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi, tentunya berusaha menjunjung tinggi dan senantiasa menjalankan prinsip dan azas yang dipersyaratkan untuk memastikan keadilan pemilu (*electoral justice*). Namun realitas yang terjadi pada komunitas masyarakat yang heterogen cenderung lebih bersifat rasional, pragmatis, tidak mudah untuk dipengaruhi, terkadang memiliki sikap ambivalen dan berorientasi ke materi. Sikap dan pandangan untuk memilih atau tidak memilih dalam proses politik lebih besar, sehingga tingkat kesadaran dan partisipasi politiknya ditentukan oleh sikap dan pandangan individu yang bersangkutan, tidak mudah untuk dipengaruhi oleh tokoh atau ikatan primordialisme tertentu (Rahmat, B. dan Esther, E., 2016). Seperti halnya prosedur demokrasi dijalankan dan dalam banyak hal dengan mekanisme yang tidak konsisten, sehingga wibawa negara tidak terbantu oleh institusi-institusi yang ada. Selain itu, dalam perkembangan dan pertumbuhan lembaga-lembaga demokrasi berbanding terbalik dengan perilaku dan interaksi politik sehingga tidak menunjang praktik demokrasi.

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengutip buku, jurnal, dokumen, media cetak, serta bahan lain yang mendukung penelitian. Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian mengenai tantangan kualitas praktik demokrasi prosedural di negara berkembang ini, maka penulis membuat batasan masalah berupa studi partisipasi politik dan perilaku pemilih dalam praktik demokrasi elektoral yang terjadi di Indonesia. Adapun rumusan masalah yang akan penulis bahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut: Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia? Dan bagaimana perilaku rasional pemilih dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia?

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Konsepsi Negara Demokrasi dan Pemilu**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga, pemilihan umum adalah pemilihan yang dilakukan secara serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat. Menurut Sukarna (1981 : 83) menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah merupakan suatu alat atau cara memperoleh wakil-wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan rakyat dan bertanggungjawab atas berhasilnya. Lebih jauh Haryanto menyatakan pada intinya pemilihan umum merupakan kesempatan bagi para warga negara untuk memilih para pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apa yang mereka inginkan

untuk dikerjakan oleh pemerintah dan dalam membuat keputusan itu para warga negara menentukan apa yang sebenarnya mereka inginkan untuk dimiliki.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum.

Salah satu ‘pabrik’ dari elemen demokrasi dihasilkan dari proses pemilihan umum. Di sisi lain, partai politik Indonesia masih bergerak lamban dan bahkan banyak di antaranya masih menjadi pragmatis dalam menjalani tanggung jawabnya sebagai lembaga politik yang seharusnya menciptakan kaderisasi yang sehat, baik dan mumpuni. Sehat dalam bergerak, baik dalam memutuskan arahnya dan mumpuni dalam menciptakan kader-kader terbaik yang akan memimpin. Alhasil, kebijakan publik menjadi kebijakan kelompok tertentu dan kesejahteraan segelintir orang. Padahal dalam konteks sistem demokrasi yang ideal, partai politik merupakan lembaga agregasi politik yang paling besar. Partai politik menjadi wadah berkumpulnya kepentingan publik, mengartikulasikannya dalam kebijakan dan membangun struktur untuk individu-individu berpartisipasi dalam politik. Di samping itu, partai politik juga berperan dalam mengontrol pemerintah dari luar sistem dengan menjadi oposisi. Namun demikian, orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dalam lembaga perwakilan, tidak hanya mewakili konstituen mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak. Oleh karena itu, seorang kader atau calon dari partai yang akan menduduki kursi kekuasaan entah pada tingkat eksekutif maupun legislatif hanya menjadi politisi untuk partainya ketika dia masih berada di luar sistem kekuasaan dan akan menjadi abdi bagi negara ketika sudah menduduki kursi kekuasaan.

Sayangnya, dalam kenyataannya terutama pada Negara berkembang, idealisme tersebut tampak utopis. Partai politik baik dalam segi kaderisasi maupun visi dan misi

tenggelam pada pragmatisme ‘kekuasaan dan uang’. Partai politik menjadi tumpul dalam menjalankan perannya baik secara internal terhadap kader maupun terhadap eksternal yakni publik dan negara. Di Indonesia, partai politik merupakan satu-satunya lembaga resmi yang diakui oleh undang-undang sebagai lembaga kader yang mampu mencalonkan kandidat pada kursi legislatif dan eksekutif. Tanggung jawab itulah yang menjadikan partai politik memiliki ‘daya tawar’ yang besar dalam sebuah sistem demokrasi. Daya tawar di sini mengarah kepada besarnya peran partai untuk bekerja dengan baik sehingga menciptakan kader yang siap dalam mengolah kekuasaan.

Lemahnya partai politik, seringkali dianggap sebagai *biang kerok* dari segala kekacauan politik di Indonesia. Partai politik yang dalam pemilu presiden harus mencapai minimal 20 % suara dalam pemilu legislatif untuk bisa mengajukan calon tanpa koalisi, harus bekerja keras dalam menggalang dukungan guna mencapai target tersebut.<sup>6</sup> Sedangkan dalam pemilu kepala daerah, untuk bisa dicalonkan seorang kandidat dari partai politik harus memiliki minimal 15 % dari keseluruhan suara. Hal ini membuat kandidat harus mengeluarkan dana untuk menggalang dukungan suara partai pengusung. Dalam data yang pernah dikeluarkan oleh Kompas, dana untuk pencalonan kepala daerah saja bisa mencapai 60 hingga 100 miliar. Dana fantastis yang tidak setara dengan pendapatan bulanan seorang kepala daerah (Farahdiba, 2014). Untungnya, kelemahan ini selalu mampu dikritisi oleh kekuatan-kekuatan dari kaum terpelajar dan mereka yang senantiasa setia pada idealisme advokasinya. Ketidakmampuan dan ketidakcakapan pada wakil-wakil rakyat pada akhirnya membangun pesimisme terhadap partai politik yang membentuknya. Konstituen hanya menjadi penting tatkala mereka belum menjadi siapa-siapa. Kampanye program-program yang lebih banyak tidak jelas dan tidak terarah kemudian tinggal menjadi janji-janji yang tidak pernah ditepati ketika para wakil rakyat tersebut telah terpilih. Sehingga, pencapaian dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan tidak dapat diukur.

Tidak kalah penting, kehadiran media yang terus menerus menyorot isu-isu yang menyimpang dari prinsip-prinsip demokrasi. Seperti halnya yang banyak terjadi di negara-negara demokrasi maju, media menjadi kekuatan keempat di luar pemerintah dan legislatif serta masyarakat. Dalam demokrasi, media dianggap sebagai *watch dog* yang menjaga keberlangsungan demokrasi dan kepentingan publik. Meski pada saat yang sama, media kemudian menjadi alat dari permainan politik dari pemilik modal dan kuasa. Memainkan wacana dan saling menyemburkan isu panas demi membangun persepsi negatif terhadap lawan politiknya. Sehingga, media yang seharusnya bisa menjadi media informasi,

pendidikan dan mobilisasi ternyata menimbulkan sinisme publik dan terhambatnya demokrasi (Sheila, 2001).

## 2. Partisipasi Politik Masyarakat

Menurut Mirriam Budiardjo (Budiardjo, 1982) memberikan pengertian tentang partisipasi politik yang merupakan kegiatan seseorang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan contacting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan.

Menurut Conyers (Conyers, 1994), ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting. *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. *Ketiga*, timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa merekapun mempunyai hak untuk turut memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan.

Menurut Samuel P Huntington dan Joan M. Nelson (Huntington, 1990) dalam bukunya "Partisipasi Politik di Negara Berkembang" menyatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas pribadi-pribadi warga, negara untuk mempengaruhi pembuatan keputusan

pemerintah. Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses demokrasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995, p. 62).

Partisipasi politik masyarakat pada Pemilihan Umum juga sangat menentukan arah dan kemajuan suatu bangsa. Kualitas partisipasi politik akan sangat ditentukan apakah semua masyarakat yang telah memenuhi wajib pilih dapat memberikan suaranya, apakah masyarakat diberikan akses atau kemudahan dalam memilih serta apakah masyarakat dapat memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Permasalahan pemilu sesungguhnya bukan hanya sebatas karena proses teknisnya yang sering ditemui banyak pelanggaran tetapi permasalahan utamanya adalah hasil atau substansi dari pemilu masih jauh seperti yang diharapkan. Hasil akhir yang sesungguhnya diharapkan dari pemilu adalah melahirkan pemimpin yang ideal. Kenyataan selama ini bahwa selain proses pelaksanaan masih bersifat amatiran dan tidak profesional, anggota legislatif terpilih yang dihasilkan lewat proses pemilu masih dianggap punya kualitas rendah, mulai dari keterbatasan profesionalisme kepemimpinan, bermasalah secara hukum serta tidak adanya kemajuan dari daerah yang dipimpinya sampai saat mengakhiri jabatan (Daud, 2016).

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang demokratis mempunyai hubungan erat dengan artikulasi aspirasi seseorang atau masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa artikulasi aspirasi yang tidak lain adalah kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang sedang dirasakan oleh masyarakat adalah merupakan motif yang mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Dengan demikian pengertian artikulasi aspirasi ini antara lain dapat diwujudkan dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dalam rangka pemilihan umum legislatif, kemampuan, kualitas, dan kemandirian masyarakat sangat diperlukan termasuk dalam pemahaman akan sistem politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Diharapkan melalui pemilihan umum legislatif ini masyarakat bisa menjadi warga negara yang baik yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam berpartisipasi politik khususnya dalam pelaksanaan pemilu legislatif, dan dapat mengarahkan bentuk atau

pola partisipasi politik masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila (Tia, 2014).

Closky dalam (Rochajat Harun dan Sumarno, 2006:130) yang menyatakan partisipasi politik adalah kegiatankegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung (*direct*) atau tidak langsung (*indirect*) dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.

### 3. Perilaku Rasionalitas Masyarakat dalam Partisipasi Politik

Sosialisasi dan pendidikan politik yang diberikan oleh lembaga sosial dalam meningkatkan partisipasi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas perilaku pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk invididu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasjional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia inginkan dengan ongkos seminimal mungkin (Saiful, 2012). Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, perilaku rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Realitas yang ada saat ini sangat marak berkembang fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pemilukada.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman.



Coleman (Coleman, 1988) menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseorang untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam Pemilu pada sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon kepala daerah dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan kepala daerah juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mencapai tujuan masing-masing.

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik keduanya sehingga dapat saling memengaruhi. Calon kepala daerah memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon kepala daerah akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uang pun tidak dapat dihindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama-sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon kepala daerah akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam Pemilu. Permainan antar aktor dan sumber daya dalam praktik money politik dalam Pemilu sedikitnya diperlihatkan dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, Membagi amplop. *Kedua*, memberikan sumbangan bahan material.

Pada akhirnya teori pilihan rasional Coleman telah mampu menjelaskan adanya keterkaitan antara aktor dan sumber daya dalam hubungannya dengan politik uang dalam Pemilu. Rasionalitas masyarakat ternyata telah memberikan pengaruh pada mereka untuk menentukan apakah mereka ikut memilih atau tidak. Uang dianggap sebagai sebuah keuntungan yang seharusnya mereka dapatkan ketika mereka sudah berkorban waktu dan tenaga untuk menggunakan hak pilihnya ke TPS. Disisi calon kepala daerah, jabatan politik menjadi sesuatu yang dianggap memberikan keuntungan besar bagi mereka sehingga mereka juga bersedia mengeluarkan ongkos atau biaya untuk bisa mendapatkannya. Namun, teori pilihan rasional Coleman belum bisa memberikan penjelasan mengenai pertimbangan apa

yang difikirkan masyarakat sehingga sumber daya begitu penting bagi mereka. Oleh karena itu, permasalahan politik uang tersebut kemudian juga bisa dilihat dari pandangan teori pilihan rasional Antony Downs guna memahami lebih dalam mengenai masalah politik uang itu sendiri.

Antoni Downs memberikan penjelasan mengenai adanya keterkaitan antara pemilihan umum dengan teori pilihan rasional. Kehidupan politik saat ini tidak hanya murni dipengaruhi oleh kepentingan politik. Namun sudah lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi di dalamnya. Begitu juga dengan Pemilu, banyak muncul pertimbangan-pertimbangan ekonomi yang difikirkan oleh masyarakat sebagai pemilih. Seperti yang diungkapkan oleh Antony Downs bahwa pilihan politik banyak ditentukan oleh evaluasi atau kondisi ekonomi, personal maupun kolektif. Masyarakat cenderung akan mempertimbangkan kehidupan ekonomi mereka pada masa pemerintahan sebelumnya, masa pemerintahan sekarang, dan masa pemerintahan yang akan datang.

### **C. Kesimpulan**

Kajian mengenai praktik politik di Indonesia hingga kini membuktikan bahwa mekanisme pemilu atau pilkada lima tahunan tidak cukup ampuh untuk “memaksa” para elite menepati janji-janjinya. Namun bukan berarti bahwa mekanisme ini tidak diperlukan lagi. Sebagai media rekrutmen dan seleksi kepemimpinan politik, mekanisme yang terjadi sekarang jauh lebih demokratis dibanding masa lalu. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk pemberian diri baik dalam bentuk keikutsertaan, kehadiran, gagasan, keterlibatan dalam perumusan kebijakan dan pemberian diri dalam pengawasan manakala kebijakan itu hendak diimplementasikan. Perilaku pemilih dalam menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor sosiologis, memuat beberapa hal yang harus digarisbawahi. *Pertama*, dalam diri pemilih, ketaatan seseorang dalam menjalankan ibadah sesuai agamanya tidak selalu memberikan pengaruh pada pilihan partai politiknya. Namun demikian, ketika pemilih dihadapkan pada pilihan calon legislatif dalam pemilu, latar belakang agama caleg memberi pengaruh terhadap pilihan calegnya, dimana pemilih cenderung memilih caleg yang menganut agama yang sama dengan dirinya. *Kedua*, adanya janji-janji pemberian bantuan materi memang tidak banyak mempengaruhi para pemilih dalam menentukan pilihannya. Namun demikian, bagi pemilih yang telah berusia lanjut, tinggal di pedesaan, dan berpendidikan rendah, maka janji-janji pemberian bantuan materi tersebut merupakan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan suaranya dalam

pemilu legislatif tersebut. *Ketiga*, dalam menentukan pilihan politiknya, para pemilih pemula sering terpengaruh oleh pilihan orang-orang di sekitarnya seperti keluarga dan teman sekelompoknya. Para pemilih pemula ini khususnya yang tinggal di pedesaan, mayoritas mengikuti sikap orang tuanya atau tokoh yang dihormati di lingkungannya. Dalam kaitannya dengan pilihan terhadap partai politik, kaum pemilih pemula ini cenderung meneruskan tradisi keluarga dengan memilih partai politik yang selama ini telah dipilih secara turun menurun oleh keluarganya dari generasi ke generasi. Sementara itu, dalam memilih calon legislatif, kaum pemilih pemula ini cenderung memilih figur yang terkenal meskipun mereka tahu lebih lanjut tentang latar belakang dan visi misi caleg tersebut.

Selanjutnya, kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor psikologis memperlihatkan beberapa catatan penting. *Pertama*, diskusi mengenai politik dalam lingkungan terkecil khususnya keluarga turut mempengaruhi pilihan dalam pemilu. Media massa khususnya televisi memberikan informasi terbanyak mengenai perkembangan politik terkini sehingga turut serta mempengaruhi pilihan dalam pemilu legislatif lalu. *Kedua*, rendahnya loyalitas terhadap partai politik serta tidak adanya identitas kepartaian pada seseorang, menjadikan mudahnya pemilih untuk pindah ke partai lainnya. Hal tersebut menyebabkan timbulnya jarak ideologis antara pemilih dengan partai politik.

Sementara itu, kajian mengenai perilaku pemilih menghadapi pemilu legislatif, yang berkaitan dengan faktor rasional/ekonomi memperlihatkan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan isu yang strategis bagi mayoritas pemilih. Pemenuhan kebutuhan ekonomi ini yang kemudian berkembang menjadi kompetisi antar kandidat anggota legislatif, maupun antar partai politik sendiri, untuk membangun kedekatan dengan pemilihnya. Tujuan utamanya adalah bagaimana bisa mendapatkan dukungan dari pemilih yang kemudian mampu memberikan kesejahteraan kepada para pemilihnya.

Rekomendasi dari penelitian ini diantaranya yaitu: *Pertama*, masyarakat harus terus meningkatkan kesadarannya akan pentingnya partisipasi dalam politik. Partisipasi politik dalam Pemilu akan menentukan pemimpin yang akan turut menentukan nasib masyarakat selama lima tahun. *Kedua*, partai politik seharusnya meningkatkan perannya dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. *Ketiga*, para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya melakukan kampanye dengan cara-cara yang lebih inovatif dan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

- Ashlagbor, N. K. (2011). *Partai Politik dan Demokrasi dalam Perspektif Teoritis dan Praktis*. Washington DC: National Democratic Institute.
- Budiarjo, M. (1982). *Partisipasi dan Partai Politik (Sebuah Bunga Rampai)*. Jakarta: PT Gramedia.
- Coleman, S. J. (1988). *Dasar-dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Daud, M. L. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum* , 22.
- Dede, M. d. (2008). *Demokrasi & Politik Desentralisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Farahdiba, R. B. (2014). Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. *Jurnal Politik Profetik*, 3, 32.
- Huntington, S. d. (1990). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ngongolay, M. H. (2015). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Desa Tamboan Kecamatan Langowan Selatan. *Jurnal Politico*, 4, 1.
- Rahmat, B. dan Esther, E. (2016). Perilaku Pemilih Pemula Dalam PILKADA Serentak Di Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Tahun 2015. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42, 25.
- Saiful, M. d. (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika.
- Sastroatmodjo, S. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sheila, S. (2001, November 22). *Coronell*. Retrieved November 30, 2019, from The Role Of The Media In Deepening Democracy: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010194.pdf>

Tia, S. (2014). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*, 1, 1.